



Mapping the Evolution of Local Government Governance Research: Insights from Scopus Data and VOSviewer Visualization

(Pemetaan Evolusi Penelitian Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Insight berbasis Data Scopus dan Visualisasi VOSviewer)

Ismail Abdullah ^{1✉} Rahmat Abd Fatah²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Ternate, Indonesia.

² Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia.

✉ Corresponding Author¹ Email: ismailabdullah@gmail.com
Email: rahmatabdullah@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 12 Okt 2025, Disetujui : 30 Nov 2025, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2025

Abstract

This study aims to map the evolution of local government governance research using a bibliometric approach based on Scopus data and VOSviewer visualization for the period 2020–2025. The method employed is quantitative bibliometric analysis combined with network analysis of 368 selected articles from an initial dataset of 4,601 documents. The findings reveal a significant increase in publication output, accompanied by a shift in research focus toward digital governance, sustainability governance, and data-driven policy. Two main clusters are identified: participatory governance, which emphasizes public participation, transparency, and accountability; and empirical governance, which focuses on performance, environmental regulation, and economic impacts. These results indicate a paradigm shift from normative approaches toward evidence-based and technology-driven governance. Additionally, the study highlights geographical disparities in knowledge production, with China, the United States, and the United Kingdom dominating the global literature. This research contributes both theoretically and practically by providing a comprehensive mapping of knowledge and serving as a foundation for future governance research and policy development.

Keywords: Local Government, Governance, Bibliometric Analysis, VOSviewer, Digital Governance

I. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan daerah (local government governance) menjadi salah satu isu kunci dalam dinamika administrasi publik global, terutama dalam konteks desentralisasi, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang responsif. Dalam dua dekade terakhir, pergeseran paradigma dari government ke governance menandai perubahan fundamental dalam cara negara mengelola urusan publik, di mana pemerintah daerah tidak lagi berperan secara hierarkis, melainkan kolaboratif dengan

berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Transformasi ini diperkuat oleh agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), yang menempatkan pemerintah lokal sebagai aktor strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut mendorong munculnya konsep digital governance dan smart city, yang mengubah pola interaksi antara pemerintah dan warga. Dalam kerangka teoritis, pendekatan new public governance dan collaborative governance menegaskan pentingnya jaringan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Ansell et al., 2023; Osborne et al., 2021). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik local government governance memiliki karakteristik yang beragam di berbagai negara, tergantung pada konteks sosial, politik, dan kelembagaan. Studi di Eropa menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas fiskal, dan partisipasi publik dalam memperkuat legitimasi pemerintah daerah (Bruno, 2025). Di Asia, khususnya Tiongkok, reformasi tata kelola lokal banyak difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi dan integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik, meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas (J. Chen et al., 2025; Deng & Zhang, 2025). Sementara itu, di India, desentralisasi fiskal dan administrasi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (G. Sharma et al., 2020), meskipun masih menghadapi tantangan koordinasi antar-level pemerintahan. Di kawasan Afrika dan Amerika Latin, isu utama berkisar pada penguatan kapasitas institusional, pengendalian korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Lü et al., 2022). Selain itu, literatur mutakhir juga menyoroti keterkaitan erat antara tata kelola pemerintahan daerah dengan isu keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan kota berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim (Leonard, 2022). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa local government governance merupakan bidang kajian multidimensional yang terus berkembang dan semakin dinamis.

Namun demikian, meskipun jumlah publikasi terkait local government governance meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup mendasar, khususnya dalam memahami evolusi pengetahuan (knowledge evolution) di bidang ini secara sistematis dan berbasis data. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat naratif, tematik, atau berbasis studi kasus, sehingga belum mampu mengungkap struktur intelektual, dinamika perkembangan topik, serta hubungan antar-konsep secara komprehensif. Pendekatan systematic literature review (SLR) yang banyak digunakan cenderung memiliki keterbatasan dalam menganalisis jaringan pengetahuan secara kuantitatif dan visual. Di sisi lain, studi yang menggunakan pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus dengan bantuan perangkat seperti VOSviewer masih relatif terbatas, terutama dalam konteks local government governance. Padahal, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk

mengidentifikasi kluster penelitian, tren topik, serta pola kolaborasi ilmiah secara lebih objektif dan terukur (Paranata, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui penggunaan pendekatan bibliometrik dan analisis visualisasi jaringan untuk memetakan evolusi penelitian local government governance secara global dalam periode 2020–2025. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tren publikasi dan distribusi bidang ilmu, tetapi juga menganalisis struktur kluster, hubungan antar-topik, serta dinamika perkembangan konsep utama dalam literatur. Dengan memanfaatkan data Scopus dan perangkat VOSviewer, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbasis bukti mengenai arah perkembangan penelitian, sekaligus mengidentifikasi tema-tema dominan seperti transparansi, akuntabilitas, kinerja, digitalisasi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi scientometric yang semakin diakui sebagai alat penting dalam analisis perkembangan ilmu pengetahuan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam arah perkembangan kajian local government governance sebagai dasar dalam merumuskan agenda penelitian masa depan dan kebijakan publik yang lebih efektif. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, mulai dari krisis lingkungan, transformasi digital, hingga tuntutan partisipasi publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemetaan evolusi penelitian menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, peluang penelitian, serta implikasi kebijakan yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis tren publikasi dan distribusi penelitian local government governance, (2) mengidentifikasi struktur kluster dan tema utama dalam literatur, serta (3) memetakan dinamika evolusi pengetahuan dalam bidang ini. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana perkembangan tren penelitian local government governance dalam periode 2020–2025? (2) apa saja kluster dan tema utama yang mendominasi literatur? dan (3) bagaimana evolusi struktur pengetahuan dalam kajian local government governance berdasarkan analisis bibliometrik?.

II. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis bibliometrik (bibliometric analysis) untuk menganalisis evolusi pengetahuan dalam kajian *local government governance*. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi struktur intelektual, tren perkembangan penelitian, serta hubungan antar-konsep secara sistematis dan berbasis data dalam skala besar. Bibliometrik juga memungkinkan eksplorasi pola kolaborasi ilmiah dan dinamika perkembangan bidang keilmuan melalui analisis jaringan (*network analysis*) (Mediawati & Rasyid, 2024).

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Data penelitian diperoleh dari database Scopus yang dikenal memiliki cakupan luas terhadap jurnal internasional bereputasi dan telah melalui proses peer-review. Proses pencarian dilakukan secara sistematis menggunakan query berikut: TITLE-ABS-KEY ("Local Government" AND "Governance") AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")). Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperoleh relevan secara substansial, mutakhir, dan berkualitas tinggi. Rentang waktu 2020–2025 dipilih karena merepresentasikan fase perkembangan terbaru dalam kajian tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait isu digitalisasi, keberlanjutan, dan transformasi kelembagaan. Data diekstraksi pada tanggal 28 Oktober 2025. Hasil pencarian awal mengidentifikasi sebanyak 4.601 dokumen sebagai dataset awal penelitian.

Proses Seleksi dan Penyaringan Data

Proses seleksi data mengacu pada prinsip transparansi dan replikasi yang diadaptasi dari kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk memastikan validitas dataset. Tahapan seleksi meliputi:

1. **Identification.** Seluruh dokumen yang diperoleh dari Scopus (n = 4.601) diidentifikasi sebagai dataset awal.
2. **Screening.** Data kemudian disaring berdasarkan relevansi topik melalui pemeriksaan judul dan abstrak. Selain itu, proses data cleaning dilakukan menggunakan VOSviewer untuk menghapus duplikasi, istilah tidak relevan, serta inkonsistensi penulisan. Setelah tahap ini, jumlah data yang layak dianalisis menjadi 4.233 dokumen.
3. **Eligibility.** Dokumen selanjutnya difilter berdasarkan kriteria ambang batas (minimum occurrence threshold) untuk memastikan

hanya istilah dan konsep yang memiliki frekuensi kemunculan signifikan yang dianalisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi noise dan meningkatkan keakuratan pemetaan jaringan.

4. **Inclusion.** Setelah proses normalisasi dan seleksi berbasis ambang batas, diperoleh sebanyak 368 dokumen yang digunakan dalam analisis bibliometrik akhir.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer versi terbaru untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan bibliometrik. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis utama, yaitu:

1. **Co-occurrence Analysis** (Analisis Kemunculan Bersama Kata Kunci). Digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar-konsep dan memetakan struktur tema penelitian. Unit analisis yang digunakan adalah *author keywords* dan *index keywords*
2. **Network Visualization.** Digunakan untuk memetakan hubungan antar istilah dalam bentuk klaster yang menunjukkan tema-tema utama dalam penelitian *local government governance*.
3. **Overlay Visualization.** Digunakan untuk menganalisis dinamika temporal dan evolusi topik penelitian berdasarkan tahun publikasi.
4. **Density Visualization.** Digunakan untuk mengidentifikasi area penelitian yang paling intensif dan dominan dalam literatur.

Dalam proses analisis, digunakan metode *full counting* dengan ambang batas minimum kemunculan (*minimum occurrence*) sebesar ≥ 5 untuk memastikan bahwa hanya kata kunci yang memiliki signifikansi tinggi yang dianalisis. Selain itu, dilakukan normalisasi istilah (*thesaurus file*) untuk menggabungkan sinonim dan menghindari redundansi, seperti penyamaan istilah "*local government*" dan "*local governance*".

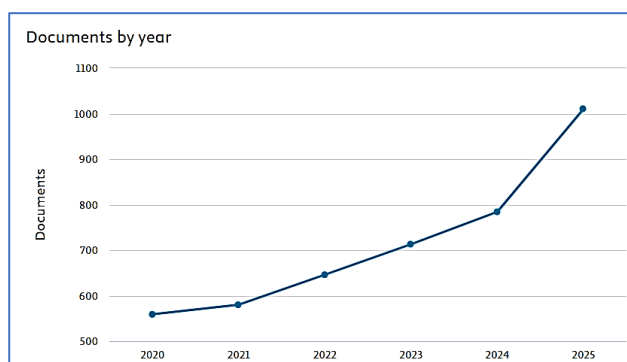
Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan dataset dari Scopus yang telah terstandarisasi secara internasional. Selain itu, proses data cleaning dan normalisasi dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan bias dan inkonsistensi data. Penggunaan VOSviewer sebagai alat analisis juga memberikan keunggulan dalam hal akurasi visualisasi jaringan dan replikasi hasil penelitian..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Perkembangan Publikasi Global (2020-2025)

Analisis terhadap data Scopus menunjukkan bahwa publikasi terkait *local government governance* mengalami peningkatan yang konsisten dan eksponensial dalam periode 2020-2025 (lihat Gambar 1). Jumlah publikasi meningkat dari sekitar 560 dokumen pada tahun 2020 menjadi lebih dari 1.000 dokumen pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan bahwa isu tata kelola pemerintahan daerah semakin menjadi perhatian utama dalam literatur akademik global.

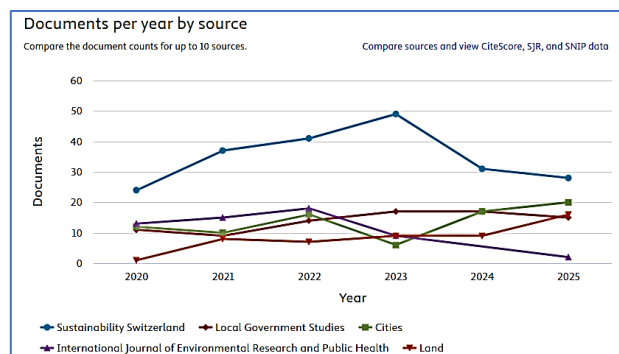


Gambar 1. Tren publikasi Tahunan (Sumber: Scopus)

Peningkatan signifikan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang mendorong transformasi tata kelola publik, khususnya dalam tiga dimensi utama: digitalisasi pemerintahan, krisis global (terutama pasca-pandemi COVID-19), dan tekanan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka *new public governance*, peningkatan ini mencerminkan pergeseran dari model birokrasi tradisional menuju tata kelola yang berbasis kolaborasi, jaringan, dan inovasi. Lonjakan tajam setelah tahun 2023 menunjukkan bahwa diskursus *governance* semakin terintegrasi dengan pendekatan *data-driven policy* dan *smart governance*. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam merespons kompleksitas global.

Distribusi Publikasi Berdasarkan Sumber Jurnal

Hasil analisis menunjukkan bahwa publikasi terkonsentrasi pada jurnal-jurnal bereputasi tinggi seperti *Sustainability*, *Local Government Studies*, *Cities*, dan lainnya (lihat Gambar 2). Di antara jurnal tersebut, *Sustainability* menunjukkan kontribusi paling dominan, terutama pada periode 2021-2023.



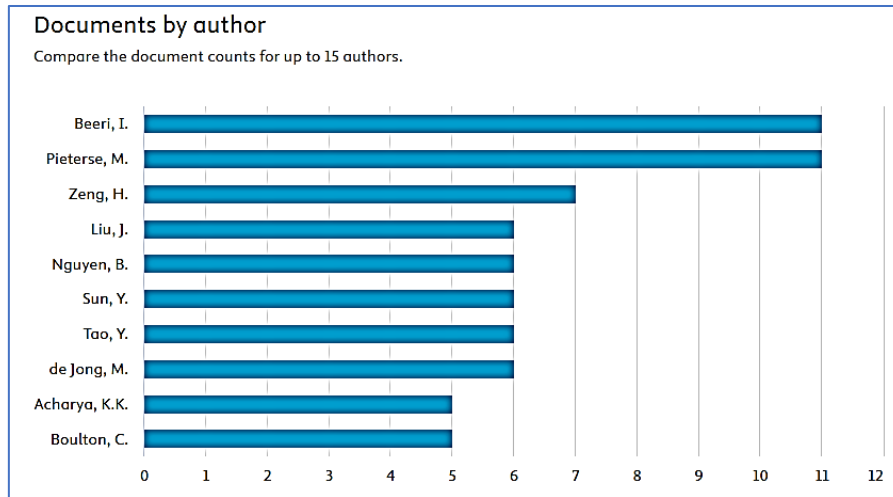
Gambar 2. Distribusi Publikasi per Tahun berdasarkan Sumber (sumber: scopus)

Dominasi jurnal berbasis keberlanjutan menunjukkan bahwa kajian *local government governance* telah mengalami pergeseran epistemologis menuju pendekatan multidisipliner. Tata kelola tidak lagi dipahami semata sebagai proses administratif, tetapi sebagai mekanisme integratif yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif *sustainability governance*, pemerintah daerah berperan sebagai aktor kunci dalam mengimplementasikan agenda SDGs, khususnya terkait perubahan iklim, pengelolaan kota, dan transisi energi. Dengan demikian, publikasi dalam jurnal-jurnal tersebut mencerminkan transformasi fokus penelitian dari *government-centric* menuju *governance-centric* yang berbasis sistem.

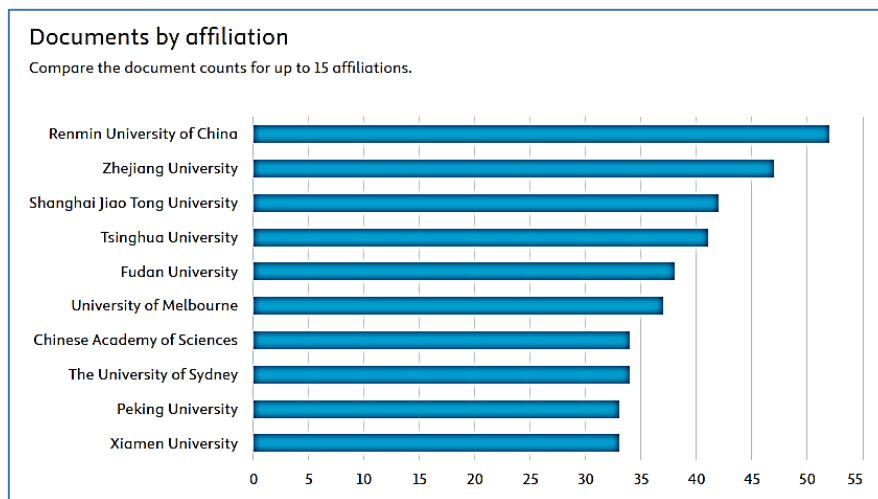
Produktivitas Penulis dan Afiliasi Institusi

Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa beberapa penulis seperti Beerli, Pieterse, dan Zeng merupakan kontributor utama dalam pengembangan literatur *local government governance* (lihat Gambar 3). Sementara itu, afiliasi institusi didominasi oleh universitas di Tiongkok, diikuti oleh institusi dari Australia (lihat Gambar 4).

Dominasi institusi Tiongkok menunjukkan adanya konsentrasi produksi pengetahuan di kawasan Asia Timur. Hal ini dapat dijelaskan oleh intensitas reformasi tata kelola di Tiongkok, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal, inovasi kebijakan, dan digitalisasi pemerintahan. Dari perspektif *knowledge economy*, fenomena ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada negara-negara dengan kapasitas riset tinggi. Hal ini juga mengindikasikan potensi bias geografis dalam literatur global, yang perlu diimbangi dengan kontribusi dari negara berkembang.



Gambar 3. Distribusi Publikasi Berdasarkan Penulis (Sumber: Scopus)

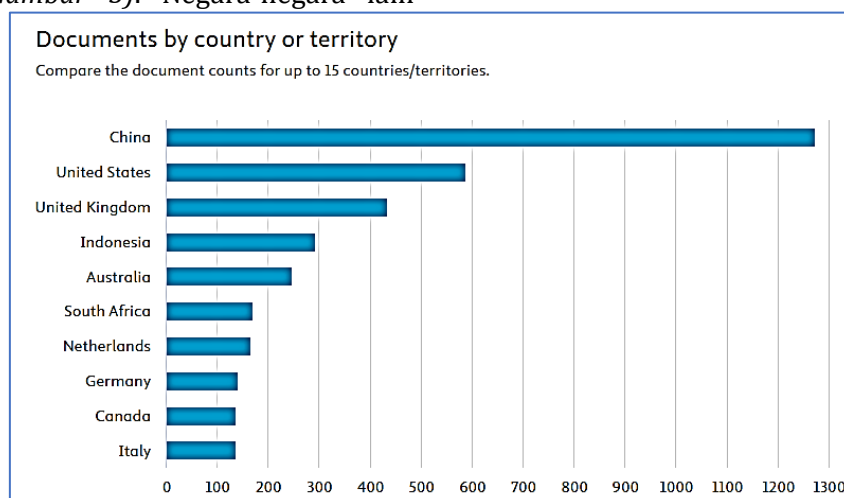


Gambar 4. Distribusi Publikasi Berdasarkan Afiliasi (sumber:Scopus)

Distribusi Publikasi Berdasarkan Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tiongkok mendominasi jumlah publikasi secara signifikan, diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris (*lihat Gambar 5*). Negara-negara lain

seperti Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan menunjukkan tren peningkatan, meskipun kontribusinya masih relatif terbatas.



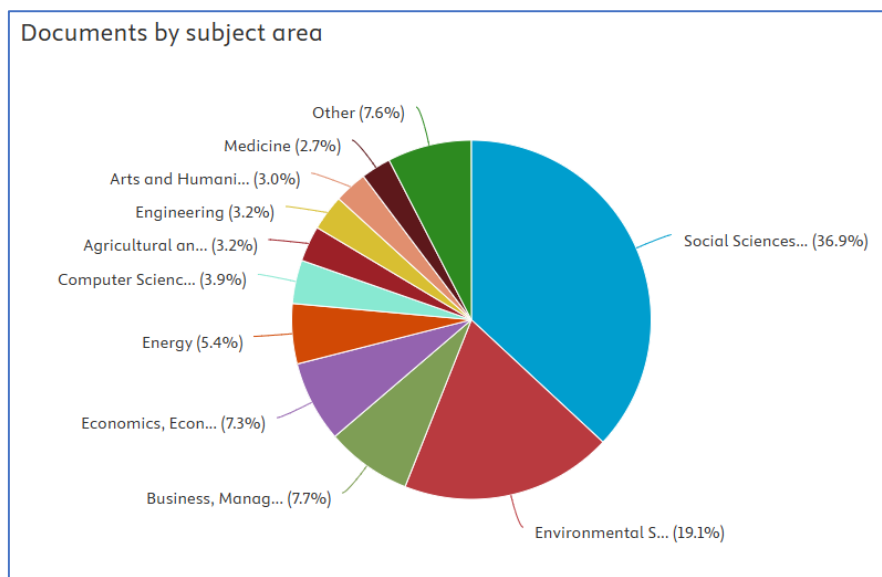
Gambar 5. Distribusi Publikasi Berdasarkan Negara (sumber: Scopus)

Dominasi Tiongkok mencerminkan peran negara tersebut sebagai emerging leader dalam studi governance, terutama dalam pendekatan empiris berbasis data panel dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based governance). Sementara itu, negara-negara Barat cenderung lebih fokus pada pendekatan normatif dan institusional. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam lanskap penelitian global. Negara-negara Global South, termasuk Indonesia,

memiliki peluang besar untuk memperkaya literatur melalui konteks lokal yang unik, seperti desentralisasi asimetris dan governance berbasis komunitas.

Distribusi Berdasarkan Bidang Ilmu

Analisis menunjukkan bahwa *Social Sciences* mendominasi dengan proporsi 36,9%, diikuti oleh *Environmental Sciences* dan bidang lainnya (lihat Gambar 6).



Gambar 6. Distribusi Berdasarkan Bidang Ilmu (Sumber: scopus)

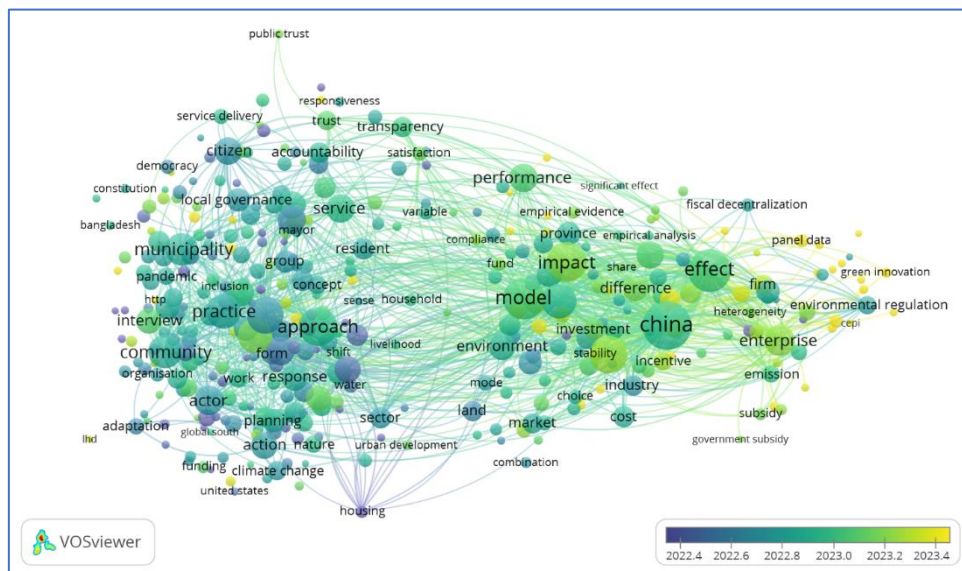
Dominasi ilmu sosial menunjukkan bahwa akar kajian governance tetap berada dalam disiplin administrasi publik dan ilmu politik. Namun, meningkatnya kontribusi bidang lingkungan dan teknologi menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan interdisipliner. Fenomena ini mencerminkan transformasi menuju integrated governance, di mana tata kelola dipahami sebagai sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara manusia, institusi, dan teknologi.

Struktur Klaster Penelitian (Network Visualization)

Hasil visualisasi jaringan menggunakan VOSviewer menunjukkan adanya dua klaster utama yang merepresentasikan struktur intelektual dalam kajian *local government governance* (lihat Gambar 7). Klaster ini tidak hanya mencerminkan pengelompokan kata kunci, tetapi juga menunjukkan diferensiasi epistemologis dalam pendekatan penelitian governance kontemporer.

Cluster 1: Governance Partisipatif dan Sosial (Merah)

Klaster pertama didominasi oleh kata kunci seperti *municipality, community, citizen, participation, service, dan accountability*. Klaster ini merepresentasikan fondasi normatif dalam kajian *local governance*, yang berakar pada teori *participatory governance* dan *collaborative governance*. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diposisikan sebagai fasilitator interaksi antara negara dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan legitimasi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan argumen bahwa tata kelola lokal yang efektif bergantung pada kualitas interaksi horizontal antar-aktor, termasuk masyarakat sipil dan komunitas local (Chikerema et al., 2024). Selain itu, literatur mutakhir dalam dataset Scopus menunjukkan bahwa dimensi partisipasi dan pelayanan publik masih menjadi isu sentral, terutama dalam konteks *public service delivery* dan *citizen engagement* di tingkat lokal (Fadrial et al., 2024). Kemunculan kata kunci seperti *trust, transparency, dan accountability* dalam klaster ini menunjukkan



Gambar 8. Overlay Visualization (Sumber: VOSviewer)

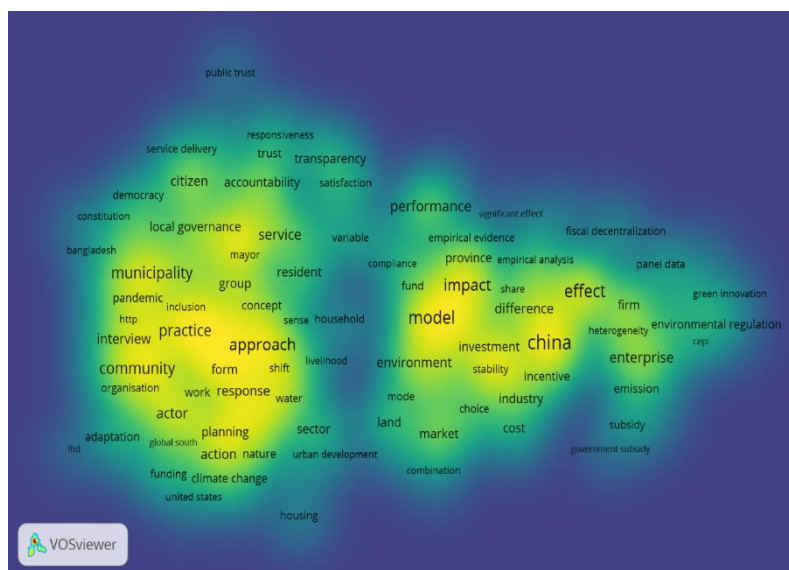
Pada fase awal (ditandai dengan warna biru), penelitian didominasi oleh topik seperti community, participation, dan local governance. Fase ini mencerminkan dominasi pendekatan normatif yang berfokus pada demokratisasi, partisipasi publik, dan desentralisasi. Namun, pada fase yang lebih baru (warna kuning), terjadi pergeseran signifikan menuju topik seperti environmental regulation, green innovation, digital governance, dan performance. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penelitian governance semakin terintegrasi dengan isu global seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan efisiensi ekonomi.

Secara teoritis, transformasi ini dapat dijelaskan melalui evolusi dari *new public governance* menuju *digital governance* dan *sustainability governance* (Arnold et al., 2025).

Studi terbaru dalam dataset Scopus juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mengadopsi teknologi digital dan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kinerja dan transparansi (J. Sun et al., 2025). Dengan demikian, evolusi ini menegaskan bahwa governance bersifat adaptif dan dinamis, mengikuti perubahan konteks global dan kebutuhan masyarakat.

Intensitas Penelitian (Density Visualization)

Analisis *density visualization* menunjukkan bahwa kata kunci seperti *municipality*, *model*, *impact*, dan *performance* memiliki intensitas tertinggi dalam literatur (lihat Gambar 10)- yang menunjukkan bahwa tema-tema tersebut merupakan pusat perhatian dalam penelitian *local government governance*.



Gambar 9. Density Visualization (Sumber: VOSviewer)

Menariknya, meskipun pendekatan empiris semakin dominan, kata kunci seperti transparency, accountability, dan trust tetap memiliki intensitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi normatif tetap menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya koeksistensi antara dua paradigma utama, yaitu *normative governance* dan *empirical governance*. Studi dalam dataset Scopus menunjukkan bahwa kombinasi antara transparansi dan kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik (Bastos et al., 2025). Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya bergantung pada efisiensi, tetapi juga pada legitimasi dan kepercayaan publik.

Sintesis Teoretis dan Implikasi

Berdasarkan seluruh temuan, evolusi *local government governance* dapat dipetakan dalam tiga transformasi utama:

1. Transformasi Struktural. Dari model *government* yang hierarkis menuju *network governance* yang kolaboratif, di mana berbagai aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Ansell et al., 2023)
2. Transformasi Epistemologis. Dari pendekatan normatif menuju *data-driven governance*, yang menekankan penggunaan data dan analisis empiris dalam perumusan kebijakan (Kondo et al., 2021).
3. Transformasi Substantif. Dari fokus lokal menuju integrasi dengan agenda global, khususnya *sustainability governance* dan transformasi digital (Ayodele et al., 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah telah berkembang menjadi sistem kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner, adaptif, dan berbasis data. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas konteks penelitian, khususnya dari negara berkembang, guna mengurangi bias geografis dalam literatur global. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam studi *governance*, sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga legitim dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Bagian Penelitian ini bertujuan untuk memetakan evolusi kajian *local government governance* melalui pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus dan visualisasi VOSviewer dalam periode 2020–2025. Hasil analisis

menunjukkan bahwa bidang ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dan transformasi konseptual yang mendalam, baik dari sisi tema, pendekatan metodologis, maupun distribusi geografis. Pertama, dari sisi perkembangan publikasi, terjadi peningkatan yang konsisten dan akseleratif, yang menegaskan bahwa *local government governance* telah menjadi isu strategis dalam literatur global. Peningkatan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan perluasan cakupan kajian menuju isu-isu kontemporer seperti digitalisasi pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi kebijakan.

Kedua, hasil analisis kluster menunjukkan adanya dualisme paradigma dalam kajian *governance*, yaitu antara pendekatan normatif-partisipatif dan pendekatan empiris-kuantitatif. Kluster pertama menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik sebagai fondasi legitimasi pemerintahan daerah. Sementara itu, kluster kedua menunjukkan dominasi pendekatan berbasis data, yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja, dampak kebijakan, dan efisiensi ekonomi. Ketiga, analisis evolusi topik menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari *governance* berbasis sosial menuju *governance* berbasis teknologi dan keberlanjutan. Topik-topik seperti *green innovation*, *environmental regulation*, dan *digital governance* muncul sebagai fokus utama dalam penelitian terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah semakin terintegrasi dengan agenda global, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transformasi digital.

Keempat, terdapat ketimpangan geografis dalam produksi pengetahuan, di mana negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mendominasi publikasi. Sementara itu, kontribusi dari negara berkembang masih relatif terbatas, meskipun memiliki konteks *governance* yang kaya dan relevan untuk dikaji. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *local government governance* telah berevolusi menjadi bidang kajian yang kompleks, multidisipliner, dan adaptif, yang menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan dalam satu kerangka analisis.

Daftar Pustaka

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, 101(1), 3–22.

- <https://doi.org/10.1111/padm.12874>
Arnold, G., Ludwick, S., Mohsen Fatemi, S., Krause, R., & Long, L. A. N. (2025). Policy entrepreneurship for transformative governance. *European Policy Analysis*, 11(3), 368–393.
<https://doi.org/10.1002/epa2.1222>
- Ayodele, O., Plantinga, P., Sanchez-Bentacourt, D., Dlamini, S., & Dlamini, N. (2025). How Do Researchers and Public Officials Co-Navigate e-Participation Implementation? An Action-Research Experience with South African Municipalities. *Systems*, 13(2).
<https://doi.org/10.3390/systems13020125>
- Bastos, P., Andrade, V., & Consoni, F. L. (2025). Driving public transit decarbonization: the role of international cooperation missions on battery-electric bus adoption in Latin America. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 34.
<https://doi.org/10.1016/j.trip.2025.101678>
- Bruno, A. S. (2025). Mobility in European Policies: A Social Right for Urban “Publicness.” *Revista de Estudos Constitucionais, Hermeneutica e Teoria Do Direito*, 17(2), 173–188.
<https://doi.org/10.4013/rechtd.2025.172.02>
- Callanan, M. (2020). Europe and the rescaling of domestic territorial governance in Ireland. *Regional and Federal Studies*, 30(2), 175–193.
<https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1491843>
- Chen, J., Liu, M., Gong, L., & Chang, C. (2025). The physical and virtual presence of the local state and citizens’ life satisfaction in urbanising China. *Urban Studies*, 62(7), 1334–1357.
<https://doi.org/10.1177/00420980241285831>
- Dai, J., Wang, Q., Zhou, X., & Qi, X. (2025). Drivers of Public Welfare Land Ratios for Regional Development in China: A Central–Local Interaction Perspective. *Land*, 14(6).
<https://doi.org/10.3390/land14061208>
- Deng, H., & Zhang, Y. (2025). The governance anticommens in renewable energy: two cases from China’s solar expansion. *Sustainability Science*, 20(4), 1421–1432.
<https://doi.org/10.1007/s11625-025-01697-5>
- Dikken, J., Kazak, J. K., Pavlovski, D., Ivan, L., Ayalon, L., Perek-Białas, J. M., & van Hoof, J. (2025). Four European typologies of older adults concerning environmental sustainability. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 211.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115276>
- Filgueiras, F., Lui, L., Rosa, T. G., & Candido Ferreira, G. (2025). The institutional design of data governance in Brazil: entropy, restrictiveness and institutional grammar. *Policy Design and Practice*, 8(1), 64–88.
<https://doi.org/10.1080/25741292.2025.2460838>
- He, B., & Homburg, V. (2025). Factors influencing accessible electronic service delivery in Chinese municipalities: a comparative analysis. *Local Government Studies*.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2604031>
- Jiang, L., & Ma, T. (2025). Adaptive Governance and Policy Evolution of the Yangtze River Fishing Ban: A Quantitative Analysis (2002–2024). *Water (Switzerland)*, 17(21).
<https://doi.org/10.3390/w17213032>
- Jin, X., Rashid Sumaila, U., Yin, K., & Qi, Z. (2021). Evaluation of the policy effect of China’s environmental interview system for effective air quality governance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), 9006.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18179006>
- Kondo, Y., Fujisawa, E., Ishikawa, K., Nakahara, S., Matsushita, K., Asano, S., Kamatani, K., Suetsugu, S., Kano, K., Kumazawa, T., Sato, K., & Okuda, N. (2021). Community capability building for environmental conservation in Lake Biwa (Japan) through an adaptive and abductive approach. *Socio-Ecological Practice Research*, 3(2), 167–183.
<https://doi.org/10.1007/s42532-021-00078-3>
- Leonard, L. (2022). Climate Change Impacts and Challenges of Combating Food Insecurity in Rural Somkhele, KwaZulu-Natal, South Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 14(23).
<https://doi.org/10.3390/su142316023>
- Liu, Y., & He, S. (2025). Financialization of China’s urban redevelopment: A case study of Guangzhou City. *Progress in Geography*, 44(11), 2250–2262.
<https://doi.org/10.18306/dlxjz.2025.11.003>
- Lü, M., Wu, Q., Yang, X., Cheng, H., Xiao, H., Sun, Y., Li, D., & Xu, Q. (2022). Numerical simulation study on volatile organic compounds emissions and its effects from gas stations in

- Xi'an. Huanjing Kexue Xuebao/Acta Scientiae Circumstantiae, 42(5), 109–118. <https://doi.org/10.13671/j.hjkxxb.2021.0509>
- Oludu, O. V, Kaya, T., & Karagozlu, D. (2025). Citizens' preference for e-participatory governance. *PLoS ONE*, 20(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306268>
- Osborne, C., Mayo, L., & Bussey, M. (2021). New frontiers in local government community engagement: Towards transformative place-based futures. *Futures*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102768>
- Pan, L., Huang, K., & Wang, Z. (2025). Local government debt and corporate stock liquidity: Evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104318>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 1–34. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Petrachin, A., & Solano, G. (2025). The Political Drivers of Horizontal Governance Relations in Small Localities: Evidence from a Cross-Country and Cross-Locality Study Across Seven Western European Countries. *Urban Affairs Review*, 61(4), 992–1029. <https://doi.org/10.1177/10780874241270050>
- Polizzi, E., & Bassoli, M. (2020). All smoke, no fire? Sharing practices and political investment in two Italian cities. *Rivista Italiana Di Scienza Politica*, 50(1), 17–32. <https://doi.org/10.1017/ipo.2019.12>
- Polman, D. (2025). Policymaking for circular urban food systems: A systematic literature review of policy instruments and governance arrangements. *Regional Science Policy and Practice*, 17(11). <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100250>
- Raja, S. I., & Larsson, J. P. (2025). Have City Deals delivered higher productivity in England? An empirical assessment of a broad-spectrum local growth policy. *Urban Studies*, 62(6), 1141–1167. <https://doi.org/10.1177/00420980241270993>
- Samosir, H., Siregar, T., Reba, Y. A., Muttaqin, M. Z., Hussain, F., & Samosir, R. C. (2025). People's mining governance and ecological impacts in Jayapura City (1998-2024). *Jurnal Hukum Novelty*, 16(2), 234–261. <https://doi.org/10.26555/jhn.v16i2.30371>
- Scelza, S., Costa, V., Delponte, I., & Schenone, C. (2025). Shaping Europe's sustainable energy policy: what the first decade of Covenant of Mayors tells us about future perspectives. *International Journal of Sustainable Energy*, 44(1). <https://doi.org/10.1080/14786451.2025.2527086>
- Sharma, G., Namchu, C., Nyima, K., Luitel, M., Singh, S., & Goodrich, C. G. (2020). Water management systems of two towns in the Eastern Himalaya: Case studies of Singtam in Sikkim and Kalimpong in West Bengal states of India. *Water Policy*, 22, 107–129. <https://doi.org/10.2166/wp.2019.229>
- Sharma, N. K., Hargreaves, T., & Pallett, H. (2023). Social justice implications of smart urban technologies: an intersectional approach. *Buildings and Cities*, 4(1), 315–333. <https://doi.org/10.5334/bc.290>
- Sun, J., Sun, X., & Wang, Y. (2025). Does Tax Competition Among Local Governments Improve the Green Economic Efficiency in the Yellow River Basin? *Sustainability (Switzerland)*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/su17115165>
- Sun, Y., Deng, Y., & Zheng, H. (2025). Can Innovation Attract Government-Guided Funds? - Empirical Evidence from Chinese A-Share Listed Companies. *Fluctuation and Noise Letters*, 24(4). <https://doi.org/10.1142/S0219477525500488>
- Sun, Y., Tang, L., & Jiang, X. (2025). Combating over-commercialization in ecotourism through collaborative governance: A game-theoretic modeling analysis. *Ecological Modelling*, 508. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2025.111194>
- Sun, Y., Ye, S., Zhong, W., & Guo, R. (2025). Collaborative governance in urban water area conservation: Strategies for mitigating blue space encroachment. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102862>
- Susilo, P. D., Wijayanto, D., Mudzakir, A. K., Suherman, A., & Wibowo, B. A. (2025). Optimizing Port Governance to Boost Fishermen Productivity: A Case Study of

- PPN Pekalongan. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 29(6), 3267–3286.
<https://doi.org/10.21608/ejabf.2025.446007.7066>
- Tahawa, T. H. B., Saudi, A. I., Fauzan, M., Ichsan, H., & Ghazali, R. (2025). Governance and Sustainable Pathways to Food Security: The Critical Role of Fiscal Capacity and Logistical Infrastructure. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(12), 5481–5490.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.201237>
- van den Boogaard, V., & Santoro, F. (2023). Co-financing community-driven development through informal taxation: Evidence from south-central Somalia. *Governance*, 36(2), 499–531.
<https://doi.org/10.1111/gove.12678>
- Wang, L., Li, X., Ye, Z., Zhang, S., Zhang, X., & Jing, L. (2025). The ongoing impact of policy documents on the pandemic based on the framework of the “4Rs” theory and policy tools: in China. *BMC Public Health*, 25(1).
<https://doi.org/10.1186/s12889-025-22504-x>
- Wong, C. (2025). Local Government Debt in China: The 2023 Bailout and Future Prospects. *China Journal*, 93(1), 112–135.
<https://doi.org/10.1086/733767>
- Xiao, H., Shen, H., & Zhou, Y. (2025). Customer Digitalization, Supplier ESG Performance, and Supply Chain Sustainability. *Frontiers of Business Research in China*, 19(4), 398–431.
<https://doi.org/10.3868/s070-020-025-0017-0>



Copyright© 2025. Ismail Abdullah



Google Scholar



GARUDA
SARANA RUJUKAN DIGITAL



iJURNAL
JURNAL INDONESIA



Crossref doi